

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)**

HENRI PAULUS GERUNGAN¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado, Ekonomi, Akuntansi
Manado 95115, Indonesia

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted: 18 Januari 2024	Accepted: 29 Januari 2024	Published: 30 Januari 2024

ABSTRACT.

Since the implementation of regional autonomy, regional governments now have extensive authority to plan, formulate and implement development policies and programs that can be adapted to local regional needs. However, in fact, regional governments tend to allocate income for operational expenditure purposes. This research aims to analyze the influence of Regional Original Income on Capital Expenditures. The research method used is a quantitative method. The data used is Regency and City APBD data in North Sulawesi Province from 2018 to 2022. The analytical method used in this research is simple regression using the SPSS version 25 application. The research results show that Regional Original Income has a positive and significant effect on capital expenditure.

Keywords: *Regional Real Income, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Namun faktanya Pemerintah Daerah cenderung mengalokasikan pendapatan untuk keperluan belanja operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 sampai 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016).

Kemajuan perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya daerah baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal. Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan

dengan undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah (Gerungan, 2017).

Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap daerah.

Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, berbeda halnya dengan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya sehingga diakui neraca. Manajemen belanja daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah agar optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai (Mahmudi, 2010:82).

peningkatan Belanja Modal yang di anggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat (Felix, 2012).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawendar dkk, 2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja operasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022.

Tabel 1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
(dalam ribuan rupiah)

Kab/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
Bolmong	668.348	149.012	817.360	81,77	18,23
Minahasa	862.810	212.878	1.075.688	80,21	19,79
Sangihe	677.097	264.807	941.904	71,88	28,12
Talaud	552.367	203.364	755.731	73,09	26,91
Minsel	656.359	75.990	732.349	89,62	10,38
Minut	698.440	169.602	868.042	80,46	19,54
Bolmut	385.607	153.663	539.270	71,50	28,50
Sitaro	394.999	82.883	477.882	82,65	17,35
Mitra	418.177	113.304	531.481	78,68	21,32
Bolsel	398.577	71.669	470.246	84,75	15,25

Boltim	366.844	70.184	437.028	83,94	16,06
Manado	1.207.180	484.832	1.692.012	71,34	28,66
Bitung	812.932	310.028	1.122.960	72,39	27,61
Tomohon	576.537	137.214	713.751	80,77	19,23
Kotamobagu	492.676	112.110	604.786	81,46	18,54

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase belanja operasi lebih besar daripada persentase belanja modal, dimana semua kabupaten/kota memiliki presentase belanja operasi lebih besar daripada belanja modal. dengan kata lain aktivitas belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara cenderung banyak digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya, yang selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasi yang relatif kurang produktif.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad, 2013:51).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan. Menurut Putro dan Pamudji (2010) indikator belanja modal dapat diukur dengan: Belanja modal = Belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jaringan + belanja aset lainnya.

Hipotesis Penelitian

H0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Yang meliputi 11 Kabupaten dan 4 Kota, jumlah populasi adalah 15 Pemerintah Daerah x 5 Tahun = 75. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu data PAD dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini mengambil semua populasi dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 5 x 15 = 75 data.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemda di Provinsi Sulawesi Utara, yakni data PAD dan Belanja Modal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun data yang digunakan adalah data Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 sampai 2022.

Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variable independen (PAD) terhadap variable dependen (belanja modal), menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana.

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Analisis Regresi Sederhana : $Y = \alpha + bX$
3. Pengujian Asumsi Klasik
4. Pengujian Hipotesis

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Dekriptif

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	75	12.905	440.191	70.28280	84.359252
Belanja Modal	75	70.184	484.832	163.15611	79.885648
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Olah Data SPSS (Dalam Ribuan Rupiah)

1. Belanja Modal

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, dimana nilai rata-rata untuk belanja modal adalah sebesar Rp 163.156,11. Nilai maksimum dari belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp 484.832. Dan nilai minimum dari belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp 70.184.

2. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, dimana nilai rata-rata untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp 70.282,80. Nilai maksimum dari pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp 440.191. Dan nilai minimum dari pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara Rp 12.905.

Analisis Regresi Sederhana

Tabel 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	120.843	9.357		12.915	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.602	.086	.636	7.037	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Olah Data SPSS

Hasil estimasi model regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 120.843 + 0,602X$$

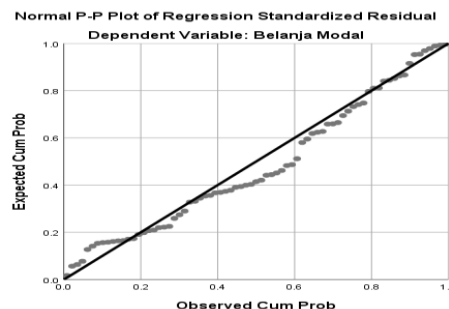
Persamaan tersebut dapat diartikan :

1. Variabel PAD (X) menunjukkan ada pengaruh terhadap Belanja Modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah PAD maka semakin tinggi Belanja Modal. Jadi jika PAD (X) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variable lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0.602 satuan.
2. Nilai konstanta sebesar 120.843 berarti apabila Pendapatan Asli Daerah tetap atau tidak mengalami perubahan maka belanja modal pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi utara sebesar 120.843.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1



Sumber : Olah Data SPSS

Berdasarkan gambar 1 di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Coefficients^a

		Collinearity Statistics		
Model		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	120.843		
	Pendapatan Asli Daerah	.602	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

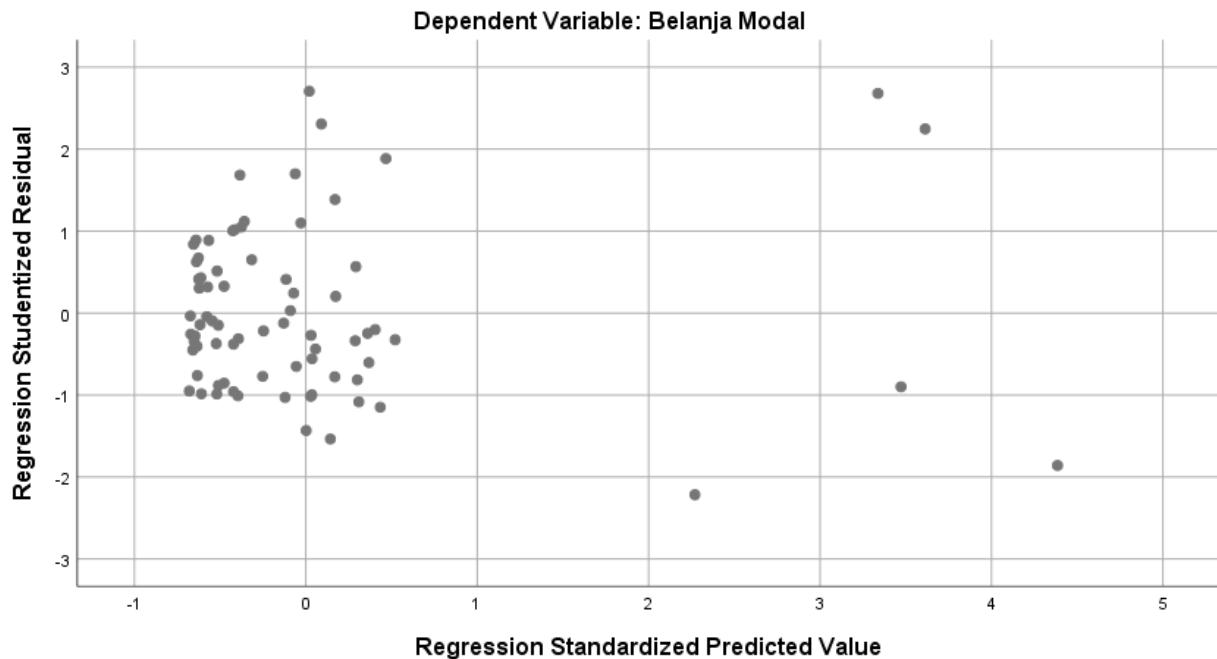
Sumber : Olah Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4 hasil perhitungan nilai *tolerance* memperlihatkan bahwa variabel independen PAD tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel tidak memiliki nilai yang lebih dari 10.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variable independen.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2

Scatterplot



Sumber : Olah Data SPSS

Hasil Scatterplot Model pada gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis Uji t (Uji Parsial)

Tabel 5
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	120.843	9.357		12.915	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.602	.086	.636	7.037	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Olah Data SPSS

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari table diatas dapat dilihat PAD mempunyai t signifikansi 0,000. Karena t signifikansi $0,000 < \alpha$ yang ditentukan yaitu 0,05, maka hipotesis diterima dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Uji F (Simultan)

Tabel 6
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	190870.793	1	190870.793	49.519	.000 ^b
	Residual	281376.244	73	3854.469		
	Total	472247.036	74			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Olah Data SPSS

Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti H_a diterima, secara simultan variable independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen belanja modal.

Koefisien Determinasi

Tabel 7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.636 ^a	.404	.396	62.084371
---	-------------------	------	------	-----------

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 7, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) adalah 0,396 artinya 39,6 % variasi dari variable independen (PAD) dapat menerangkan variable dependen (tingkat materialistas), sedangkan sisanya sebesar 0,604 (60,4%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Temuan hasil penelitian ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung berperan positif atau meningkatkan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi penerimaan daerahnya secara maksimal. Misalnya pemerintah daerah dapat memaksimalkan Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2007). Untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana untuk menuju tempat pariwisata tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah. Dari penerimaan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gounder *et al.*, (2007), Sugiardi & Supadmi (2014), serta Abba (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa peningkatan atau penurunan tingkat Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi peningkatan dalam belanja modal pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian Belanja Modal.
2. Pengujian secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal dengan koefisien determinasi 39,6 %, dan selebihnya 60,4 % di pengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, Mohammed., Ahmed, Bawa Bello., and Salihu, Aliyu Modibbo. 2015. Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science and Commerce*, 6(1), pp: 67-77.
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Gerungan H, Saerang DP, Ilat V. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*. 2017;8(1).
- Gounder, Neelesh., Narayan, Paresh Kumar., and Prasad, Arti. 2007. An Empirical investigation of the relationship between government revenue and expenditure: The Case of the Fiji Islands. *International Journal of Social Economics* , 34(3), pp: 147-158.
- Jolianis. 2016. *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4, No. 2, Hal. 34-57.
- Kawendar, Warsito, Rohman Abdul, Handayani Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Permatasari. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5, No. 1
- Putro, N.S. dan S. Pamudji. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, BPFE UGM: 33-40*. Yogyakarta.
- Sugiardi Rini, Supadmi Ni Luh. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495 ISSN: 2302-8556 .
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.